

**PENGARUH KONTRIBUSI PDRD TERHADAP PAD PROVINSI BALI
DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

**Putu Aditya Andira Patra¹
I Made Jember²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
E-mail: andiraapatra@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel pemoderasinya. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali. Populasi Penelitian ini adalah seluruh Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali tahun 2013 – 2017. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Teknik sampel jenuh. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis *Moderated Regression Analysis* untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali, Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali, dan Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh Pajak daerah dan Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of regional taxes and regional levies on PAD with economic growth as a moderating variable. This research was conducted in Bali Province. The population of this study is the entire District and City Budget Realization Report in the Province of Bali in 2013 - 2017. The technique for determining the sample used is the saturated sample technique. This study uses the Moderated Regression Analysis analysis technique to determine the effect of Economic Growth as a moderating variable. The results of hypothesis testing indicate that local taxes have a positive and significant effect on Bali's original regional income, regional levies have no effect on Bali Province's original income, and economic growth strengthens the influence of regional taxes and regional retribus on the original revenue of Bali Province.

Keywords: regional original income, regional tax, regional retribution, economic growth

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah – daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajak daerah daerah sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak daerah daerah dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan undang – undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang – undang.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan (Oates, 1993). Otonomi daerah (desentralisasi) memaksa suatu daerah untuk mengatur dan mengurus keuangan daerahnya secara mandiri menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Lewis, 2003).

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan

pemerintah daerah berusaha menggali sumber – sumber perekonomian daerah yang dijadikan pendapatan daerah. Salah satu adalah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, dimana pajak daerah ditetapkan berdasarkan peraturan tertentu mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak daerah untuk penerimaan daerah (Ayuningtyas, 2008).

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab negara dibiayai oleh APBN (Mayasari, 2009).

Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Mayasari, 2009).

Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, pemerintah pusat mendesentralisasikan sebagian besar fungsi dan sumber daya

kepada pemerintah kabupaten/kota bukan provinsi (Fitriani, *et al.*, 2005). Adapun penerimaan pajak daerah yang dapat diperoleh dari pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan kabupaten/kota diatarannya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet,

Selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam PAD. Retribusi Daerah dapat digolongkan menjadi Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Kemampuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan : 1). Menyediakan pelayanan publik dasar kepada masyarakat, terutama Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar; 2). Memberikan pemahaman kepada investor dan eksportir; 3). Menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran, terutama tenaga kerja local tanpa harus menciptakan hambatan terhadap tenaga kerja daerah lain; 4) memperbaiki pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan berfokus pada UKM lokal; 5). Ikut mengendalikan inflasi lokal (Tim Jurnal otonomi daerah, 2008).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah akan memberikan pendapatan yang memadai bagi masyarakatnya sehingga tingkat kesadaran dalam sumbangsuhnya kepada pajak akan meningkat juga. Peningkatan pertumbuhan

ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita (Boediono, 1985). Secara sederhananya, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan dari Produk Domestik Regional Daerah (PDRB) (Saragih, 2003).
Perkembangan PDRB Provinsi Bali.

Pada tahun 2017 ekonomi Bali tumbuh sebesar 5,59 persen. Angka ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 6,32 persen. Pertumbuhan sebesar 5,59 persen tersebut, menyatakan bahwa ekonomi di Provinsi Bali tetap tumbuh dengan stabil walaupun peningkatannya tidak sebesar tahun – tahun sebelumnya.

Syuhada Sofian (2007), dalam penelitiannya membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah Penerimaan Pajak. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah satu faktor positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi dan konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan konsumsi memungkinkan usaha – usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan (Dumairy, 1996). Besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh PDRB pertumbuhan ekonomi dan kebijakan baik pusat maupun daerah, jadi pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan masing – masing jenis pajak daerah tersebut (Musgrave, 2003). Pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dapat terwujud dengan upaya-upaya yang di lakukan pemerintah daerah, untuk itu peran pemerintah sangat penting dalam proses pembangunan (Nurudeen, 2010).

Panji (2014) dalam penelitiannya membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka pendapatan asli daerah tersebut semakin besar. Pertumbuhan ekonomi yang positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah. Pertumbuhan ekonomi (PDRB) memiliki hubungan yang sangat fungsional terhadap PAD dikarenakan PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah dari berbagai sektor, baik penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah yang selanjutnya akan membiayai program – program pembangunan yang nantinya akan meningkatkan PDRB itu sendiri (Budiraharjo, 2003).

Tabel 1.
Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Bali 2013 – 2017(dalam Milyar Rupiah)

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
2013	2.529,9761	2.202,3926	0,0388
2014	2.911,7408	2.517,4430	0,0427
2015	3.041,2666	2.571,0358	0,0450
2016	3.041,1929	2.593,0935	0,0534
2017	3.398,4722	2.871,3542	0,0464

Sumber: Provinsi Bali Dalam Angka 2014 - 2018

Dari Tabel 1 Realisasi penerimaan rutin Provinsi Bali, terlihat bahwa penerimaan Provinsi Bali terus meningkat setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi tumpuan dari PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah, Di Provinsi Bali sendiri PAD dari pajak daerah terus mengalami peningkatan yang terbesar terlihat pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.871,3542 milyar. Ini menjadikan potensi pajak daerah se-kabupaten/kota Provinsi Bali masih bisa di tingkatkan dan dikembangkan.

Alasan peneliti memilih Provinsi Bali sebagai objek penelitian dikarenakan Provinsi Bali memiliki Pendapatan Asli Daerah yang meningkat secara positif setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dikarenakan Provinsi Bali memiliki cukup banyak kawasan-kawasan wisata yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar yang salah satunya bersumber dari sektor perdagangan dan pajak lainnya yang terkait dengan pajak daerah, selain itu setiap tahunnya penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak sama kontribusi pengaruhnya terhadap PAD.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dina Anggraeni (2010), pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dikarenakan sumber pendapatan suatu daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah. Menurut Dian Maya Sari (2009), pajak daerah kabupaten dan kota masih tergolong sangat rendah selain itu kontribusi pajak daerah terhadap PAD untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih tergolong sangat rendah, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif namun tidak cukup signifikan dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2009). Tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan retribusi dan pajak)

selama tahun 2001 menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan publik (Lewis, 2003). Wurzel (1998) menegaskan meskipun mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (charge), kewenangan ini perlu dipertimbangkan untung-ruginya (cost and benefit), misal dalam penentuan tarif layanan publik. Keengganan masyarakat untuk membayar pajak ataupun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan. Akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon negatif (Mardiasmo, 2009).

Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif berfluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (Sidik, 2002; Bappenas 2003). Lewis (2003) menemukan terjadi kenaikan penerimaan yang cukup signifikan terkait dengan penerimaan pemerintah daerah, yaitu sebesar 56 % untuk pemerintah provinsi dan 103 % untuk pemerintah kabupaten dan kota. Dari kenaikan tersebut, PAD memberikan kontribusi pada masing-masing pemerintah daerah sebesar 76 % dan 46 %. Gambaran ini menunjukkan belum optimalnya pemerintah daerah dalam menggali potensi lokal yang dimiliki. Peningkatan PAD sebenarnya merupakan eksese dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan

terkait dengan pajak ataupun retribusi. Sektor-sektor industri, khususnya jasa, perlu dioptimalisasi. Jumlah pendapatan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kekuatan keuangan pemerintah daerah, semakin tingginya *revenue* pemerintah daerah maka kecil kemungkinan daerah untuk mengalami kesulitan keuangan dalam pendanaan insfrastruktur bagi pembangunan pemerintah daerah (Jones dan Walker, 2007)

Pajak dan retribusi sebagai komponen terbesar PAD sangat terkait dengan kegiatan sektor industri. Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan ekses/nilai tambah dari lebih optimalnya sektor industri ini (Kadajtmiko dan Mahi dalam Sidik, 2002). Dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD (pajak dan retribusi) yang akan diterima. Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB. Analisis elastisitas PAD terhadap PDRB yang dilakukan oleh Bappenas (2003) pada pemerintah propinsi menunjukkan ada 12 propinsi (41,37 %) yang mempunyai nilai elastisitas ≥ 1 (lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap perubahan PAD. Sedangkan propinsi yang lain perubahan PDRB-nya tidak cukup mempengaruhi perubahan PAD. Patut diduga adanya kenaikan nilai tambah PDRB lebih banyak keluar dari daerah tersebut. Kenaikan pertumbuhan ekonomi (PDRB) memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dikarenakan keengganan membayar pajak dan retribusi sudah tertangani oleh pertumbuhan ekonomi yang merata pada daerah tersebut (Saragih, 2003).

Pajak daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, dimana pajak daerah merupakan salah satu sumber dari terbentuknya pendapatan asli daerah, Mayangsari (2009) mengatakan dalam penelitiannya peningkatan kontribusi pajak daerah akan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah yang dibayarkan oleh masyarakat daerah tersebut guna membantu pembangunan daerah tersebut. Penelitian ini juga di dukung oleh Dina Anggreni (2010) tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa semakin meningkatnya pajak daerah yang diterima akan meningkatkan juga pendapatan asli daerah tersebut dikarenakan sumber dari pendapatan asli daerah salah satunya adalah pajak daerah.

Oleh karena itu, peningkatan pajak daerah akan mempengaruhi pendapatan asli daerah, dikarenakan pajak daerah merupakan salah satu dari pendapatan suatu daerah yang diperoleh langsung dari daerah tersebut, bukan dari luar daerah. Dengan begitu hipotesis yang dapat diambil adalah :

H₁ : Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali.

Pendapatan asli daerah tersebut bersumber salah satunya dari retribusi daerah. Retribusi daerah memberikan pemasukan atau peningkatan pada pendapatan asli daerah yang berasal dari pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Jones (2007) mengatakan Pajak dan Retribusi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi pendapatan asli daerah tertentu, dikarenakan pembayaran – pembayaran wajib yang sudah

pasti akan diterima oleh suatu daerah. Pada Provinsi Bali khususnya pemasukan retribusi daerah dan pajak daerah tidak seimbang, dikarenakan Provinsi Bali menerima Pajak daerah dari sektor pariwisata yang sangat besar sehingga pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah tidak signifikan dibandingkan dengan pajaa daerah (Kusuma, 2013). Dengan perbandingan penelitian terdahulu dan ulasan berikut hipotesis yang dapat diambil adalah :

H₂ : Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali

Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah seharusnya saling berkaitan dengan keadaan ekonomi suatu daerah (Saragih, 2003). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada umumnya akan meningkatkan nilai PDRB suatu daerah, yang akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah tersebut dimana peningkatan tersebut berasal dari meningkatnya pembayaran pajak yang dilakukan , meningkatnya lapangan pekerjaan, dan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap jasa tertentu. (Jones, 2007). PDRB yang semakin meningkat akan memberikan efek positif terhadap perekonomian suatu daerah yang akan secara signifikan meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Nurudeen (2010) dalam penelitiannya menyatakan pertumbuhan ekonomi yang baik pada suatu daerah akan berimbang pada peningkatan kesejahteraan daerah tersebut, dimana dengan peningkatan kesejahteraan akan memberikan tingkat kemakmuran financial yang akan berdampak pada meningkatnya pajak daerah dan retribusi daerah (pendapatan daerah) tersebut.

H₃ : Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Fajril, 2016). *United Nations Development Program* setiap tahunnya mempublikasikan indikator pertumbuhan ekonomi untuk 175 negara (Gubrel, 1998), Indikator tersebut dikenal dengan nama Produk Domestik Bruto.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengankenyataan adanya tambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan papan, sandang, pangan, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Infrastruktur yang ada didaerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, daerah menjadi nyaman maka akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat namun juga diharapkan mampu mengikis jurang kesenjangan yang saat ini masih dijumpai baik secara sektoral, regional maupun kesenjangan pada level mikro rumah tangga (Rasyid, 2017).

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan produk domestic bruto (PRDB). Produk Domestik Regional Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Mirza, 2012).

Penyajian angka dalam PDRB dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Salih, 2012). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan peningkatan pendapatan yang terjadi, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat. UNDP juga menyatakan bahwa sampai akhir tahun 1990an, pembangunan manusia di Indonesia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan PDB akan mendorong masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik (Artana, 2015).

Pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dengan kenaikan output (Produk Domestik Bruto) dan pendapatan riil per kapita memang bukanlah satu – satunya sasaran negara – negara berkembang, namun kebijakan ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan output perlu dilakukan karena merupakan syarat penting untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mendukung tujuan kebijakan pembangunan lainnya (Suartha, 2017).

Menurut Nurcholis (2007) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah juga berasal dari daerah itu sendiri yakni pendapatan asli daerah serta lainlain pendapatan yang sah. pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam membiayai kegiatan operasionalnya (Kong, 2008). Sektor pajak dan retribusi daerah sampai saat ini masih memegang peranan yang dominan dalam penerimaan daerah (Janina, 2007).

Hal ini didukung oleh Mardiasmo (2009), yang menyebutkan bahwa pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah (Legrenzi, 2001). Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD, hasil penelitian yang di lakukan oleh Mahendra dan Ulupui (2015).

Dari beberapa kutipan penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali dan penyusunan penelitian dilakukan di kota Denpasar dengan alasan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Bali memiliki tingkat perekonomian yang menarik di setiap Kabupatennya. Hal inilah yang menjadikan tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memiliki cukup banyak kawasan-kawasan wisata yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar yang salah satunya bersumber dari sektor perdagangan dan pajak lainnya yang terkait dengan pajak daerah, selain itu setiap tahunnya penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak sama kontribusi pengaruhnya terhadap PAD. Maka untuk menunjang pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperbaiki pendapatan masyarakat.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dengan mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode sensus yang mengambil data penerimaan pajak, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah Provinsi Bali dari tahun 2002 - 2017.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk melihat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Variabel moderasi nantinya akan membuktikan apakah akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Persamaan regresi yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 Z + \beta_5 X_2 Z + \mu \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- Y : Pendapatan Asli Daerah
- α : Konstanta
- $\beta_1 - \beta_5$: Koefisien regresi masing-masing faktor
- X_1 : Penerimaan Pajak Daerah
- X_2 : Retribusi Daerah
- Z : Pertumbuhan Ekonomi
- μ : *Error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.230	.262		4.692	.000		
	Pajak Daerah	.766	.096	.753	7.989	.000	.740	1.351
	Retribusi Daerah	.613	.342	.169	1.790	.081	.740	1.351

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pajak daerah pada PAD diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,766 Hasil ini mempunyai arti bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan pada PAD sehingga hipotesis 1 (satu) diterima.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh retribusi daerah pada PAD diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,081 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,613. Hasil ini mempunyai arti bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD sehingga hipotesis 2 (dua) ditolak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 4.6 dapat disusun persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,230 + 0,766 X_1 + 0,613 X_2 \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

Y = PAD

X₁ = Pajak daerah

X₂ = Retribusi daerah

Persamaan regresi linier dengan rumus menunjukkan variabel Pajak Daerah memiliki nilai 0,766 sehingga dapat disimpulkan secara statistik bahwa setiap kenaikan variabel Pajak Daerah sebanyak satu milyar rupiah, maka PAD akan naik sebesar 0,766 milyar rupiah karena memiliki hubungan yang searah, dengan asumsi nilai variabel bebas lain yaitu Retribusi Daerah bernilai tetap. Koefisien variabel pajak daerah bernilai positif sehingga menunjukkan variabel pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD.

Persamaan regresi linier termenunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah memiliki nilai 0,613, sehingga dapat disimpulkan secara statistik bahwa setiap

kenaikan variabel Retribusi Daerah sebanyak satu milyar rupiah, maka PAD akan naik sebesar 0,613 milyar rupiah karena memiliki hubungan yang searah, dengan asumsi nilai variabel bebas lain yaitu Pajak Daerah bernilai tetap. Koefisien variabel Retribusi Daerah bernilai positif sehingga menunjukkan variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif tetapi tidak berpengaruh terhadap PAD.

Hasil analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa nilai R^2 pada regresi pertama sebesar 0,724 atau 72,4% sedangkan setelah ada persamaan regresi kedua nilai R^2 naik menjadi 0,777 atau 77,7%. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi merupakan variabel moderasi yang memperkuat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka hipotesis 3 (tiga) diterima.

Berdasarkan data yang diolah dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,013 + 0,119 X_1 + 1,735 X_2 + 0,115 (Z) + 0,008(X_1Z) - 0,50 (X_2Z)$$

Nilai koefisien $\beta_4 = 0,008$. Hal ini bermakna bahwa setiap interaksi pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, PAD akan semakin meningkat. Nilai koefisien $\beta_5 = - 0,50$. Hal ini bermakna bahwa setiap interaksi retribusi daerah dengan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, PAD akan semakin menurun.

Berikut penjelasan mengenai hasil analisis regresi moderasi, terdiri atas uji kelayakan model (Uji F), koefisien determinasi (R^2), dan uji hipotesis (uji t).

Tabel 3.
Tabel Uji Kelayakan Model (uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	171.892	2	85.946	55.150	.000 ^b
	Residual	65.453	42	1.558		
	Total	237.345	44			

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi yang pada Tabel 3, besarnya nilai signifikansi *P value* 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hasil ini memberikan makna bahwa seluruh variabel independen mampu memprediksi atau menjelaskan pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), pertumbuhan ekonomi (Z), interaksi $X_1.Z$, interaksi $X_2.Z$, secara simultan berpengaruh terhadap PAD. Hal ini berarti bahwa model dapat digunakan untuk analisa lebih lanjut.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Peneliti menggunakan nilai *adjusted R²* pada penelitian ini. Hal ini karena nilai *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Hasil uji memberikan hasil besarnya *adjusted R²* (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) sebelum dipengaruhi variabel moderasi, pertumbuhan ekonomi (Z), sebesar 0,711, dan hasil meningkat setelah dipengaruhi variabel moderasi, pertumbuhan ekonomi menjadi 0,754. Hal ini berarti variasi PAD dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), pertumbuhan ekonomi (Z), interaksi $X_1.Z$, interaksi $X_2.Z$, sebesar 75,4%, sedangkan sisanya sebesar 24,6 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Pendeteksi normalitas data dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov Smirnov* dengan kriteria *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari *level of significant* yang dipakai yaitu 5%, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal, namun sebaiknya jika *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih kecil dari *level of significant* 5%, maka data mempunyai distribusi tidak normal. Hasil uji normalitas untuk seluruh sampel dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,062

Sumber: Data diolah, 2019

Hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,062. Nilai tersebut lebih besar dari *level of significant*, yaitu 5% (0,05). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa residual sudah berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pendeteksian ada atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat dilihat pada nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pajak daerah	0,740	1,351
Retribusi daerah	0,740	1,351

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* masing-masing variabel penelitian memiliki nilai lebih dari 0,1 (10%) dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan Uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan dengan cara meregresi nilai *absolute* dari model yang diestimasi terhadap variabel bebas. Nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi
Pajak daerah	0,700
Retribusi daerah	0,064
Pertumbuhan ekonomi	0,102

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 6 ditunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model penelitian bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi dijalankan untuk menguji apakah pada model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan yang sekarang dengan kesalahan yang sebelumnya. Pendeteksian ada atau tidaknya autokorelasi, dapat dilakukan dengan

pengujian *Durbin Watson*. Kriteria yang berlaku adalah sebagai berikut, $DU < DW < 4 - DU$ maka H_0 diterima (tidak terjadi autokolerasi), $DW > DL$ atau $DW > 4 - DL$, maka H_0 ditolak (Terjadi autokolerasi), $DL < DW < DU$ atau $4 - DU < DW < 4 - DL$ (Tidak ada kepastian/ kesimpulan pasti).

Tabel 7.
Hasil Uji Autokolerasi

Durbin Watson	Kriteria	Keterangan
1.700	$DU < DW < 4 - DU$ $1.424 < 1.700 < 2.576$	Tidak terjadi Autokolerasi

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa nilai DW adalah 1.700 yang artinya berada diantara nilai DU dan $4 - DU$, yang menunjukkan bahwa tidak terjadi autokolerasi dalam penelitian ini.

Dari hasil output SPSS pada hasil uji diperoleh hasil bahwa variabel Pajak Daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Provinsi Bali. Hal ini dibuktikan dari t_{hitung} sebesar 7.989 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, yang menandakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak bisa lepas dari Penerimaan Pajak Daerah sehingga hipotesis 1 (satu) diterima.

Hal ini didukung oleh penelitian dari Dian Anggraeni (2010) yang menyatakan bahwa peranan pajak daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangatlah penting dan berpengaruh signifikan. Waluyo (2010) juga menyatakan bahwa pajak daerah sebagai salah satu faktor pembentuk pendapatan asli daerah sangatlah penting pengaruhnya dan dalam penelitiannya mengatakan peranan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Tengah.

Dari hasil uji t diperoleh hasil bahwa variabel Retribusi Daerah (X2) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Provinsi Bali. Hal ini dibuktikan dari t_{hitung} sebesar 1,790 dan nilai signifikansi sebesar 0,081 lebih besar dari 0,05 yang menandakan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap PAD sehingga hipotesis 2 (dua) ditolak.

Hal ini didukung oleh penelitian Krisna (2013) yang menyatakan pengaruh retribusi daerah khususnya pada Provinsi Bali tidak cukup signifikan dikarenakan perbandingan kontribusi yang besar antara retribusi daerah dengan faktor – faktor lainnya sedangkan Dina (2010) mengatakan retribusi daerah berpengaruh positif dalam pendapatan daerah Provinsi Bengkulu

Hasil output SPSS menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hasil analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa nilai R^2 pada regresi pertama sebesar 0,724 atau 72,4% sedangkan setelah ada persamaan regresi kedua nilai R^2 naik menjadi 0,777 atau 77,7%. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi merupakan variabel moderasi yang memperkuat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan daerahnya sehingga mampu meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah tersebut (Waluyo, 2010). Pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang positif terhadap Pajak Daerah. Temuan penelitian ini konsisten dengan Saragih (2003)

yang menyatakan bahwa peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan Bappenas (2000) yang menyatakan bahwa, pertumbuhan PAD seharusnya sensitive terhadap kenaikan PDRB.

SIMPULAN

Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. Dengan kata lain jika Pajak Daerah Provinsi Bali meningkat maka Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali akan meningkat, namun jika Retribusi Daerah Provinsi Bali meningkat maka Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali tidak akan meningkat. Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali, dengan kata lain semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan memperkuat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali.

Saran dari peneliti kepada pemerintah daerah Provinsi Bali sebaiknya berkonsentrasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikarenakan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi akan memperkuat juga penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan meningkatnya pajak daerah dan retribusi daerah akan berpengaruh pada peningkatan PAD, sehingga pemerintah akan semakin mudah membiayai kegiatan – kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, selain itu, dengan peningkatan PAD akan berpengaruh terhadap fasilitas – fasilitas bagi masyarakat

Provinsi Bali. Selain itu perlu diadakan sosialisasi mengenai potensi daerah yang di miliki Provinsi Bali, agar pendapatan per kabupaten dan kota merata tidak terjadi ketimpangan.

Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, baik dari segi jumlah sampel yang hanya meliputi 9 Kabupaten/Kota pada Provinsi Bali, tahun penelitian yang hanya terbatas sampai 5 tahun. Serta pembahasan mengenai pendapatan daerah dan retribusi daerah. Oleh sebab itu diperlukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas, karena hasil yang diperoleh bisa saja berbeda apabila dilakukan pada daerah lain di Indonesia. Agar penelitian ini lebih baik sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun juga menambah beberapa variabel lain yang kiranya berpengaruh terhadap PAD.

REFERENSI

- Artana. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 8. No. 1. Hal. 63 – 71
- Ayuningtyas, Arniyanti. 2008. Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah (Studi kasus pada Seluruh Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah). Skripsi pada FEIS UIN Jakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2013-2017. *Badung Dalam Angka*. Badung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2013-2017. *Denpasar Dalam Angka*. Denpasar.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2013-2017. *Buleleng Dalam Angka*. Buleleng.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2013-2017. *Jembrana Dalam Angka*. Jembrana.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2013-2017. *Tabanan Dalam Angka*. Tabanan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2013-2017. *Gianyar Dalam Angka*. Gianyar.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2013-2017. *Klungkung Dalam Angka*. Klungkung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2013-2017. *Bangli Dalam Angka*. Bangli.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2013-2017. *Karangasem Dalam Angka*. Karangasem
- BAPPENAS. 2000. Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2017. *Karangasem Dalam Angka*. Karangasem
- BAPPENAS. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Boediono. 1985. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Penerbit BPFE: Yogyakarta
- Budi Rahardjo. 2009. Laporan Keuangan perusahaan. Edisi kedua. Penerbit GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS. Yogyakarta
- Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: 1996.
- Fajril, Muhammad. 2016. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 9 No. 2. Hal. 99 – 107
- Fitrani, Fitria, Bert Hofman, and Kai Kaiser. 2005. *Unity in Diverity? There Creation of New Local Government in a Decentralising Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol.41 No.1 PP: 57-79.
- Gubrel, Harbert. 1998. *Economic Freedom And Human Welfare: Some Empirical Findings*. *Journal Of Simon Fraser University*, Vol.2 PP: 287-304.
- Janina, Seputiene. 2007. *The Reation Between Social Capital, Governence and Economic Performance in Europe*. *International Journal Of Economic and Financial Issues*, Vol.8 No.3 PP: 131-138.
- Jones, Stewart Dan R. G., Walker. 2007. *Explanators Of Local Government Distress*. *Journal Abacus*, Vol.43 No.3 PP: 396-418.
- Kusuma. 2013. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 5. No. 3 Hal. 574 – 585
- Kong, Tao. Arif Ramayanti. 2008. *Survey Of Recent Developments*. *Bulletin Of Indonesia Economic Studies*, Vol.44 No.1

- Legrenzi, Gabriella & Costas Milas, 2001. *Non Linier And Asymetric Adjustment In The Local Revenue-Expenditure Models: Some Evidence From The Italian Municipalities. Journal University of Milan, Vol.5 No.1*
- Lewis, Blane D. 2003. Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charges in Indonesia. Research Triangle Institute. North Carolina. Working Paper
- Lewis, Blane D. 2003. Tax and Charge Creation by Regional Governments Under Fiscal Desentralisation : Estimates and Explanations. Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 39, No. 2, Pages: 177 - 92
- Mahendra dan Ulupui. 2015. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.11 No.3 Hal: 863-877.*
- Mahi Raksaka. 2002. Managing Local Revenue in Indonesia. Journal of Georgia University, Atlanta.
- Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI
- Mayasari, Dian. 2009. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analsisi terhadap Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). *Skripsi. FE UMM.*
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal, Vol.1 No.1 Hal: 1-15.*
- Musgrave A. Richard dan Musgrave B. Peggy, 2003, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Edisi kelima, Erlangga, Jakarta.
- Nurudeen, A., & Usman. 2010. *Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria 1970-2008: A Dissagregate Analiys. Business and Economic Journal, Vol.4. PP: 1-11.*
- Oates, W. 1993. *Fiscal Decentralization And Economic Development. National Tax Journal. XLVI. PP: 237-243.*
- Panji Kartika Jaya, I Putu Ngurah, dan Dwirandra, A.A.N.B. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. Vol. 7. No. 1. Hal. 79 – 92.*
- Rasyid, Mohtar. 2017. Konvergensi Pendapatan Provinsi Jawa Timur: Pendekatan Panel Kota/Kabupaten Periode 2000 – 2013. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 10. No. 2. Hal. 145 – 154*

- Salih, Mohame Abdel Rahman. 2012. *The Realationship Between Economic Growth and Government Expenditure: Evidence From Sunda. International Business Research Journal*, Vol.5 No.8 PP: 40-46.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Gahalia Indone sia.
- Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Wisuda Angkatan XXI STIA LAN Tahun Akademik 2001-2002. Orasi Ilmiah
- Suartha. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 10. No. 2. Hal. 95 – 107
- Tim Jurnal otonomi Daerah. 2008. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap pembangunan Ekonomi Daerah. Vol. VIII. No. 4. Hal 28 – 30
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 9 Buku 1. Penerbit Salemba Empat : Jakarta
- Wurzel, Eckhard. 1998. *Germany Reforming Federal Fiscal Relation*. Organization for Economics Development. The OECD Observer.